

## AA Gede Geriya Penjabat Walikota Denpasar

DENPASAR, NusaBali

Kementerian Dalam Negeri menetapkan AA Gede Geriya sebagai Penjabat Walikota Denpasar menyusul berakhirnya masa jabatan IB Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara per 11 Agustus 2015. Penetapan ini dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Selasa (11/8), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Acara ini juga dihadiri mantan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama mantan Wakil Walikota I GN Jaya Negara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Sekot Denpasar AAN Rai Iswara, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, bendesa adat, dan tokoh masyarakat Kota Denpasar.

Gubernur Pastika dalam sambutannya mengatakan Penjabat Walikota Denpasar mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemerintahan hingga terpilihnya walikota dan wawali hasil pemilukada. "Selamat kepada AA Gede Griya sebagai Penjabat Walikota Denpasar," ujarnya.



IB Rai Dharmawijaya Mantra (kanan) mengucapkan selamat kepada AA Gede Geriya selaku Penjabat Walikota Denpasar sesuai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Selasa (11/8), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Pastika mengatakan sebagaimana walikota definitif, penjabat walikota harus memahami sungguh-sungguh tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dalam memahami seluruh ketentuan pemilukada.

Rai Mantra mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat dan SKPD Pemkot Denpasar yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Denpasar. "Apa yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan

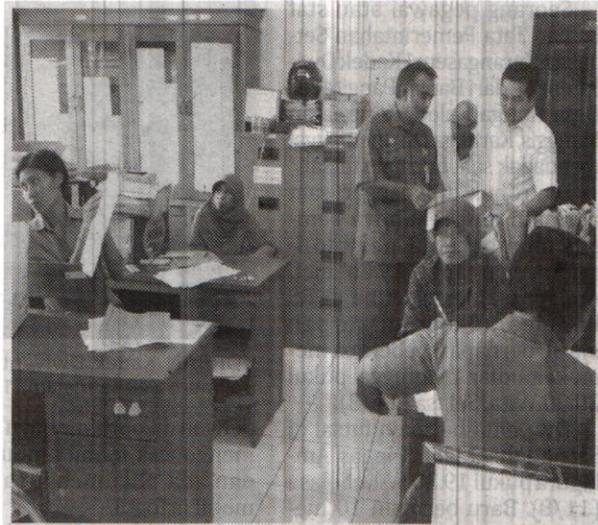
ditingkatkan dengan motto Sewaka Dharma semua harus melayani dan dapat menjadi panutan masyarakat," ujar Rai Mantra.

AA Gede Geriya ditemui usai pelantikan mengatakan Kota Denpasar dengan berbagai prestasi yang telah diraih, seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI dan penghargaan lainnya tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Jaya Negara. Sehingga sebagai Penjabat Walikota hanya beberapa bulan, AA Gede Geriya meminta kepada semua pihak dapat melakukan hal yang sama bahkan dapat ditingkatkan sebagaimana motto Sewaka Dharma. Tugas penjabat sebagai tugas yang penuh tantangan dengan heterogenitas penduduk sehingga memerlukan kerja keras dalam meningkatkan capaian prestasi yang telah diperoleh Pemkot Denpasar.

Dalam acara juga dilakukan serah terima jabatan antara IB Rai Dharmawijaya Mantra dengan Penjabat Walikota AA Gede Geriya. Ketua TP PKK Kota Denpasar melakukan serah terima jabatan dari Ny IA Selly Dharmawijaya Mantra kepada Ny AA Purnawati Geriya. @

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 3



WAKIL Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan sidak ke Bagian Ekbang Jembrana, Selasa (11/8).

## Pencairan Bantuan Hibah Dikebut

NEGARA, NusaBali

Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan perintahkan Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Jembrana kebut pencairan dana hibah. Wabup Kembang beri tenggat waktu hingga Jumat (14/8). Permintaan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bagian Ekbang, Selasa (11/8).

Saat sidak, Wabup Kembang melihat sejumlah masyarakat duduk mengantré, bahkan ada beridiri untuk memproses pencairan bantuan hibah. Melihat kondisi itu, ia perintahkan Ekbang agar menambah kursi. "Kita

juga minta stafnya ditambah, biar pelayanan maksimal. Apalagi sekarang juga banyak kegiatan HUT Kota, semua harus berjalan dengan baik," pinta Wabup Kembang kepada Kabag Ekbang Jembrana, Made Mangku Kusumayuda.

Menurut Wabup Kembang, dana hibah yang sedang proses itu diminta dapat dituntaskan pada tanggal 14 Agustus. Tidak ada alasan pencairan yang tertunda, karena pemohon sekaligus penganggarnya sudah terencana sejak setahun lalu, melalui kesepakatan bersama DPRD Jembrana. "Sekarang ini tinggal pencairan. Kemarin,

kita sudah serahkan secara simbolis ke desa-desa. Sekarang ini tinggal pencairan, dan kita minta dapat segera diproses," tambah Wabup Kembang.

Permintaan pencairan hibah dengan batasan waktu sampai tanggal 14 Agustus itu tidak terlepas aturan dalam keikutsertaan sebagai calon incumbent bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha, dalam Pilkada Jembrana tahun ini. Dimana, calon incumbent, diberikan batasan ruang gerak selama 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Batasan yang dimaksud, tidak diperkenankan menung-

gangi program seperti bansos jelang pilkada. "Kita tidak ingin ada tudingan macam-macam nantinya. Jadi kita minta segera, meskipun ini sebenarnya program rutin setiap tahun," tukas Wabup Kembang.

Sementara Kabag Ekbang Jembrana, Made Mangku Kusumayuda, mengatakan untuk tahun 2015 ada sebanyak sebanyak 900 kelompok penerima dana hibah, dengan total dana Rp 7,5 miliar. Di antaranya ada dianggarkan untuk masjid Rp 25 juta, mushola Rp 2,5 juta, dadia Rp 5 juta, dan kelompok pengajian Rp 2 juta. **od**

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 7



## Seratusan Guru Pengawas Terancam Kehilangan Tunjangan

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 111 guru pengawas tingkat TK dan SD, terancam kehilangan hak atas tunjangan sebagai seorang pengawas. Masalahnya, mereka baru diakui sebagai pengawas yang memenuhi kriteria setelah enam bulan bertugas. Celakanya lagi, sebagian dari mereka sudah kembali sebagai guru biasa atau tidak lagi sebagai pengawas.

Informasi yang dihimpun, semula ada 111 guru diangkat sebagai pengawas tingkat TK dan SD melalui SK yang terbit pada bulan Januari 2015. Namun pada tanggal 25 Juni 2015, sebanyak 66 dari mereka dikembalikan sebagai guru biasa. Konon, mereka yang dikembalikan sebagai guru biasa itu dianggap tidak memiliki kriteria sebagai seorang pengawas sesuai dengan regulasi dari Permendikbud 143 Tahun 2014. Sesuai dengan regulasi tersebut, 55 pengawas lainnya justru baru diakui status jabatan kepengawasannya pertanggal 25 Juni 2015.

Akibat kondisi tersebut, mereka terancam kehilangan hak atas tunjangan sebagai pengawas selama enam bulan periode Januari-Juni. Masalahnya, hingga memasuki bulan Agustus mereka belum terima tunjangan atas jabatan sebagai pengawas. Kabarnya, tunjangan seorang pengawas dalam setahun mencapai Rp 20 juta.

Terhadap persoalan tersebut, Komisi I DPRD Buleleng meminta penjelasan dari pihak Disdik Buleleng, Selasa (11/8). Pertemuan yang digelar di ruang Komisi, gedung DPRD Buleleng, dihadiri oleh Sekretaris Disdik, I Made Ngadeg. Dalam pertemuan itu, Disdik Ngadeg mengaku, pihaknya baru mengetahui

regulasi dari Permendikbud tersebut pada bulan Maret 2015.

Sehingga sesuai kriteria yang ada dalam regulasi tersebut, maka pihaknya mengadakan perubahan pengisian jabatan pengawas untuk tingkat TK dan SD. "Kami juga baru terima petunjuk teknis dari Permendikbud itu di bulan Maret, sehingga ini juga menjadi persoalan kami," terangnya.

Terhadap penjelasan tersebut, Komisi I langsung menilai pihak Diknas telah teledor dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, pihak Diknas semestinya sudah mengetahui Permendikbud tersebut diawal tahun 2015, apalagi Permendikbud itu sudah terbit di tahun 2014 lalu. "Ini kan sangat disayangkan, bagaimana cara kerja di Diknas itu, karena sekarang ini kan sudah system on line di internet, sudah bisa diakses, kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Jangan-jangan Disdik tidak pernah mengakses kebijakan lewat internet," kata Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa.

Menurut politisi PDIP asal Desa Banjar ini, tunjangan dari para pengawas tersebut harus dibayarkan oleh Disdik. Karena para pengawas itu telah bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sejak periode Januari sampai Juni.

"Kami tetap minta hak mereka itu harus dibayarkan, karena mereka telah bekerja.

Walaupun di antara mereka itu bukan lagi sebagai pengawas, tapi periode Januari-Juni, mereka adalah pengawas," tandasnya. Diperkirakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tunjangan pengawas bagi 111 pengawas itu mencapai Rp 1,3 miliar lebih. **k19**

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 4



## Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa Replik, JPU Tetap Pada Tuntutan

DENPASAR, NusaBali

Setelah Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) membacakan pledoi (pembelaan) dalam sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa Klungkung, kini giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyampaikan replik (jawaban atas pledoi) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (11/8). Dalam replik yang dibacakan untuk 9 terdakwa yang disidang dalam 3 berkas terpisah, JPU Made Pasek dkk menyatakan tetap pada tuntutan sebelumnya.

"Kami tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan, Senin 3 Agustus 2015 lalu. Sekaligus apa yang kami sampaikan dalam replik memperkuat surat tuntutan kami," tegasnya. Dalam tuntutan sebelumnya, JPU menjatuhkan tuntutan yang bervariasi sesuai dengan peran-peran para terdakwa.

Untuk Eks Sekda Klungkung yang merupakan Ketua Tim Pengadaan Lahan, Janapria serta eks Kepala BPN Klungkung yang merupakan Wakil Ketua II, Mastini dituntut paling berat, yaitu 3 tahun penjara. Sementara 7 terdakwa lainnya, yaitu Made Ngurah yang merupakan eks Asisten I dan Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta, I Nyoman Sukantra, I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja dituntut hukuman 2,5 tahun penjara.

Dalamuntutannya, JPU juga memasukkan denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan penjara kepada 9 terdakwa. Sementara itu, kuasa hukum 9 terdakwa, Simon Nahak dkk yang diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik (jawaban atas replik) menyatakan tetap pada pledoi yang disampaikan.

"Kami tetap pada pledoi," tegasnya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada, Selasa (18/8) mendatang dengan agenda pembacaan putusan untuk empat terdakwa, yaitu terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta dan I Nyoman Sukantra dengan majelis hakim yang diketuai Putu Gde Haryadi.

Di hari yang sama, dua terdakwa lainnya, yaitu I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gde yang disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Cening Budiana juga akan mengagendakan pembacaan putusan.

Sementara itu, untuk Eks Sekda Klungkung yang juga Ketua Panitia Pengadaan Lahan, I Ketut Janapria, eks Kepala BPN Klungkung yang juga Wakil Ketua II, AA Sagung Mastini serta Wakil Ketua I, Made Ngurah dengan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing baru akan membacakan putusan pada, Kamis (20/8) mendatang. **rez**

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 5



# Tenaga Kontrak Sedot Rp 43 Miliar Setahun

★ Dewan Desak

## Segera Lakukan Rasionalisasi

Jumlah tenaga kontrak yang tercatat sudah mencapai 2.810 orang, belum termasuk tenaga kontrak di RSUD Buleleng. Jumlah yang ditengarai overload itu sedot anggaran APBD Buleleng sebesar Rp 43 miliar setahun.

SINGARAJA, NusaBali

Keberadaan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Buleleng, kembali dipersoalkan oleh kalangan anggota DPRD Buleleng. Selain dicurigai terus bertambah, ke-

beradaan mereka juga dianggap membebani APBD. Anggota Dewan pun mendesak langkah rasionalisasi tenaga kontrak tersebut.

Demikian terungkap ketika Komisi I DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng Selasa (11/8) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komisi, I Putu Mangku Mertayasa bersama anggotanya. Hadir dalam rapat tersebut Kepala BKD Buleleng Ni Made Rosumini bersama stafnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi, I Wayan Teren mengungkapkan, jumlah tenaga kontrak di beberapa instansi sudah cukup banyak. Bahkan, diketahui seorang tenaga kontrak tidak jelas tugas dan tanggungjawabnya. Diantara mereka bahkan diketahui baru bekerja antara satu sampai enam bulan. "Jumlahnya terus bertambah dan pernah saya temukan di satu instansi ada yang baru sebulan dan

ada enam bulan bekerja. Jadi masih ada penambahan pegawai kontrak baru dan kalau kita cermati ini sudah sangat melebihi," kata politisi Hanuar asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi lainnya, I Putu Tirta Adnyana. Bahkan dari data yang dihimpun, jumlah tenaga kontrak yang tercatat sudah mencapai 2.810 orang. Jumlah itu belum termasuk tenaga kontrak di RSUD Buleleng yang juga terbilang cukup banyak.

Dari jumlah tenaga kontrak itu, diperkirakan menyedot anggaran setiap tahunnya mencapai Rp 43 miliar, karena rata-rata gaji tenaga kontrak antara Rp 700 ribu hingga Rp 1,5 juta, perorang perbulan. "Ini cukup membebani APBD kita tiap tahunnya," ujar politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Terhadap persoalan itu, Komisi I mendesak agar Pemkab Bule-

leng mengambil upaya rasionalisasi jumlah tenaga kontrak. Ketua Komisi, Putu Mangku Mertayasa menyatakan, rasionalisasi yang diinginkan bukan berarti harus memangkas jumlah tenaga kontrak. Rasionalisasi yang dimaksud, memberdayakan tenaga kontrak yang ada dalam peningkatan pelayanan, sehingga setiap tenaga kontrak memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas.

"Sehingga mereka (tenaga kontrak, red) lebih produktif dalam peningkatan pelayanan. Bagi yang tidak produktif, ini yang perlu dirasionalisasi, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak," jelasnya.

Sementara Kepala BKD Buleleng Ni Made Rosumini mengaku, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait dengan keberadaan tenaga kontrak tersebut. Karena, rekrutmen dan pemberian gaji berada di masing-masing SKPD

yang membutuhkan. "Kita tidak memiliki kewenangan soal tenaga kontrak itu, karena semuanya dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya sempat melakukan upaya pendataan tenaga kontrak di tahun 2014 lalu. Kala itu, jumlah tenaga kontrak yang disampaikan oleh masing-masing SKPD terkait mencapai 2.855 orang. "Jumlah tenaga kontrak itu kan tergantung dari kebutuhan di masing-masing SKPD, jadi jumlahnya juga bisa berubah-ubah, kalau kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang bisa langsung diputus," jelas Rousmini.

Terkait rasionalisasi, pejabat asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini, tidak bisa memberikan tanggapannya. Hal ini tergantung dari kebijakan dan sebelum dilakukan kajian terkait efektifitas dan beban kerja di masing-masing SKPD di lingkup Pemkab Buleleng. **k19**

Edisi : Rabu, 12 Agustus 2015

Hal : 4